



PPKM Level 3 Batal, Pelaku Wisata Was-was

YOGYA (KR) - Pelaku wisata, salah satunya pelaku bisnis jasa akomodasi atau perhotelan di DIY baik bintang maupun nonbintang mengaku masih tetap was-was dan khawatir terkait pembatalan rencana penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 serentak di tanah air selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Selain itu, kondisi bisnis perhotelan di DIY masih belum kunjung membaik, maka PHRI DIY terus berupaya semampunya untuk bangkit dan menutup kerugian yang sudah hampir dua tahun karena pandemi Covid-19.

"Kita menyambut baik pembatalan pemberlakuan PPKM Level 3 serentak selama Nataru, karena saturasi atau oksigennya semakin tinggi bagi pelaku wisata. Tetapi, kita butuh konsistensi kebijakan pemerintah saat ini, jangan seperti momentum yang sama tahun lalu yang semua kebijakannya serba mendadak dan memberatkan wisatawan. Jadi kami masih tetap khawatir dan was-was saat mendapatkan angin segar ini," tutur Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono kepada KR di Yogyakarta, Kamis (9/12).

Deddy menyampaikan kekhawatiran pelaku perhotelan yang masih dalam kondisi wait and see dan was-was ini berdasarkan kondisi tahun lalu. Untuk itu, PHRI DIY belum menyiapkan bahkan baki bagi tamu-tamu yang akan menginap selama momentum Nataru nantinya.

"Kita masih menunggu dan melihat konsistensi kebijakan pemerintah yang telah disampaikan dengan membatalkan PPKM Level

3 serentak. Jangan sampai angin segar tiba-tiba berubah menjadi angin topan atau badai jelas kita akan menerima kerugian yang cukup besar sehingga kita sudah banyak belajar dari pengalaman 2020 lalu," imbuhnya.

General Manager Hotel Ruba Grha Yogyakarta ini menekankan pihaknya akan melakukan evaluasi kesiapan pihak perhotelan di DIY pada dua pekan jelang Nataru. Jika kebijakan pemerintah tetap tidak ada perubahan maka pihaknya bisa membelanjakan bahan baku dan otomatis akan lebih mahal.

"Kita berupaya mengurangi risiko kerugian jika pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan yang lebih. Kami melalui Satgas telah meminta seluruh anggota PHRI DIY baik di kabupaten/kota agar memperkuat dan disiplin protokol kesehatan sebagai point utama. Kita sudah edarkan kepada seluruh anggota di DIY dan mohon ditaati, karena jangan sampai pariwisata menjadi kambing hitam jika terjadi lonjakan kasus pandemi Covid-19," jelas Deddy.

Sementara itu Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan pengesahan Komite Nasional Disabilitas beberapa waktu yang lalu, merupakan sebuah kemajuan yang membuat situasi pandemi Covid-19 pada

2021 berbeda dengan tahun sebelumnya bagi para penyandang disabilitas. Diharapkan, lembaga ini dapat menjadi lokomotif bagi semua upaya yang menciptakan lingkungan yang

inklusif bagi para disabilitas di tanah air.

Perhatian pemerintah diwujudkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan penyandang disabilitas tertuang

dalam berbagai kategori program. Dalam hal vaksinasi misalnya, penyandang disabilitas masuk kategori prioritas penerima vaksin Covid-19 sejak awal 2021. (Ira/Ret)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005